



Asian Productivity Organization “The APO in the News”

Name of publication: Tribunnews.com (21 NOVEMBER 2015, Indonesia)

Page: <http://aceh.tribunnews.com/2015/11/21/produktivitas-pelayanan-publik-pun-perlu-diukur>

Produktivitas Pelayanan Publik pun Perlu Diukur

Sabtu, 21 November 2015 14:59



OLEH DR TAQWADDIN HUSIN, Kepala Ombudsman RI Provinsi Aceh, melaporkan dari Manila, Filipina

KEHADIRAN saya selama satu minggu di Filipina kali ini atas undangan Asian Productivity Organization (APO) yang berpusat di Tokyo, Jepang. Organisasi ini merupakan lembaga pemerintah pada masing-masing negara yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pelayanan publik pada setiap negara di Asia.

Pertemuan ini untuk membahas dan menyepakati standar the measurement of productivity in public sector. Peserta pertemuan ini berasal dari: Malaysia, Vietnam, Bangladesh, Cina, Laos, Kamboja, India, Filipina, Thailand, Iran, Mongolia, Pakistan, Nepal, dan Indonesia. APO juga menghadirkan tiga narasumber dari tiga negara yang tingkat produktivitasnya sudah bagus, yaitu Profesor Dean Parham dari Australia, Profesor Hiroki dari Jepang, dan Dr Zahid dari Malaysia. Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia merupakan empat negara di Asia yang tingkat produktivitasnya sudah membaik. Jadi, wajar jika negara-negara tersebut dijadikan narasumber dan model pembelajaran. Sayangnya, Korea Selatan dan Singapura tidak menghadiri workshop APO 2015 di Manila ini.

Semua peserta merupakan pejabat dari masing-masing negara. Mereka umumnya pejabat dari Kementerian Perindustrian dan Perekonomian, rata-rata doktor di bidang matematika, statistik, atau sains. [Pemerintah](#) Indonesia mengutus dua orang wakilnya, yaitu Gatot Sugiharto, pejabat di Kemenpan RI dan saya, Kepala Ombudsman RI Provinsi Aceh. Terus terang, kami agak kewalahan memahami penjelasan saat mendiskusikan indeks-indeks perekonomian dan pertumbuhannya. Untung saja saya pernah belajar ekonomi sedikit, meski hanya sarjana bidang ekonomi manajemen. Dan ini ternyata tidak cukup.

Dari workshop tersebut tergambar jelas betapa pentingnya kita mengukur produktivitas, tidak cukup hanya sampai pada laporan kinerja atau performance. Konsep dasar dan filosofi dari produktivitas adalah perbandingan antara input dengan output, sehingga makin besar quantity output suatu sektor publik yang didanai pemerintah, maka akan semakin bagus, karena output yang besar akan memberikan outcome (dampak) yang signifikan bagi masyarakat.

Saya tak tahu apakah selama ini pemerintah sudah mengukur dampak dari output yang dihasilkannya. Apakah [Pemerintah Aceh](#) dengan anggaran yang demikian besar pasca-MoU Helsinki sudah memberi kontribusi bermakna bagi rakyatnya? Mungkin beberapa program terbukti bermanfaat bagi masyarakat Aceh, seperti: Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), beasiswa dalam dan luar negeri, juga program rumah duaafa. Tapi apakah sudah pernah dihitung, seberapa besar productifity dari program-program tersebut? Sebaiknya, pihak DPRA dan Ombudsman Aceh dapat mempertanyakan hal ini secara resmi pada [Pemerintah Aceh](#).

Pertemuan ini baru mendiskusikan tataran konsep filosofi untuk mendapatkan kesamaan pandangan di antara negara-negara se-Asia. Tentu saja diperlukan pertemuan lanjutan untuk dapat menerapkan bagaimana metodologi, teknik, dan formula untuk mengukur tingkat produktivitas suatu sektor publik. Peserta dari negara-negara anggota juga menyarankan pada APO agar merancang suatu template standar yang dapat diaplikasikan pada semua negara Asia dalam melakukan pengukuran tingkat produktivitas tersebut.

Menurut saya, penting bagi **Pemerintah** Aceh untuk mengukur produktivitas masing-masing pelayanan publik, baik meliputi barang publik, jasa publik, maupun administratif publik. Dengan adanya pengukuran yang jelas dan berstandar, pemerintah akan tahu kelemahannya selama ini, dan akan tahu pula bagaimana upaya untuk meningkatkan produktivitas. Ini tentu saja akan berdampak positif, baik bagi masyarakatnya maupun bagi pemerintah, yaitu: akan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, akan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita anggota masyarakat, akan dapat mengurangi kesenjangan sosial, akan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan bisnis.

Pengalaman Malaysia yang sudah hampir 15 tahun melakukan hal ini dapat menjadi acuan bagi **Pemerintah** Aceh. Produktivitas Malaysia terbukti dan banyak warga Aceh yang ikut menikmati produktivitas mereka. Produktivitas Malaysia di bidang kesehatan dan pengobatan, misalnya, terbukti dalam banyak lebih bagus dari Aceh. Oleh karenanya, banyak orang Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, bahkan dari Jakarta berdatangan untuk berobat ke Malaysia. Ini semua karena produktivitas mereka yang terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Kita tak perlu belajar jauh-jauh ke Eropa, Amerika, atau Australia. Cukup ke Malaysia saja atau menggunakan konsultan dari Malaysia untuk mengukur produktivitas sektor publik kita. Semoga catatan sederhana ini menjadi sumbangan pemikiran untuk kemajuan Aceh.

** Bila Anda punya informasi menarik, kirimkan naskah dan fotonya serta identitas Anda ke email:
redaksi@serambinews.com*